

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar ke empat di dunia dan dikarenakan Indonesia memiliki bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif maka diprediksi negara ini akan menjadi salah satu negara dengan potensi sumber daya manusia terbesar di dunia. Akan tetapi, melimpahnya sumber daya manusia ini tidak dapat diserap dan dipergunakan dengan baik karena tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas baik dari segi keterampilan maupun ketersediaan lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berbagai cara pun telah dilakukan, namun tetap saja sumber daya manusia Indonesia tidak terserap dengan baik.

Beberapa kelompok masyarakat pun melihat bahwa terdapatnya masalah tersebut membuatnya memilih beberapa opsi lain, termasuk mencari keberuntungan ekonomi di luar negeri. Kelompok masyarakat yang mencari, mendapatkan dan melakukan suatu pekerjaan di luar negeri tersebut lah yang biasa disebut dengan buruh migran atau lebih spesifik lagi apabila mereka berwarga negara Indonesia maka dapat

disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia.¹ Penempatan kegiatan pekerjaan untuk TKI pun dapat dilakukan di berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, keilmuan, kesenian, atlet olahraga dan lain sebagainya serta dapat ditempatkan dalam pekerjaan formal maupun informal. Terdapatnya kesempatan bekerja di luar negeri ini terlihat menarik bagi sebagian masyarakat yang mungkin masih jadi pengangguran di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah TKI yang berhasil ditempatkan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam jangka waktu tiga periode (2014 – 2016) tercatat jumlah penempatan TKI di luar negeri mengalami penurunan. Pada tahun 2014 terdapat 429.872 orang, kemudian menurun hampir separuhnya pada tahun 2015 yaitu 275.736, lalu menurun kembali di tahun 2016 dengan jumlah 234.451 orang TKI. Sedangkan apabila dilihat dari penempatan tenaga kerja berdasarkan provinsi maka Jawa Barat menjadi provinsi yang menyumbangkan buruh migran Indonesia terbanyak dengan angka sebesar 51.407 orang – berdasarkan data pada tahun 2016.² Walaupun secara nasional jumlah penempatan TKI terus menurun akan tetapi adanya buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat menjadi cara untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

¹ Selanjutnya penulisan disingkat menjadi TKI.

² Pusat Penelitian dan Pengembangan BNP2TKI. 2017. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016*. Jakarta: BNP2TKI. Hlm. 1-2.

TKI sebagai pahlawan devisa negara tidak jarang dihadapi dengan berbagai problema termasuk berbagai masalah yang sering ditemui baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan. Apabila berada di negara tujuan, masalah yang dimungkinkan dapat ditemui antara lain, seperti ketidakadilan perlakuan hukum yang diterima TKI hingga eksploitasi manusia yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Masalah tidak hanya terdapat di negara tujuan saja, didalam negeri pun berbagai masalah dan halangan kerap sekali ditemui, mulai dari tidak ilegalnya status TKI, sulitnya birokrasi, pungutan liar menyangkut pemberangkatan dan pemulangan hingga masalah sosial dan ekonomi setelah mereka menjadi eks TKI.

Beragam-macam masalah yang telah disebutkan diatas, di sisi lain sepertinya pemerintah sudah melakukan upaya yang semaksimal mungkin agar berbagai masalah tersebut tertanggulangi. Sebut saja salah satunya perlindungan terhadap TKI yang terjerat hukum pidana di negara penempatan tujuan ataupun masalah eks pekerja migran yang bermasalah saat dipulangkan, seperti kekurangan ekonomi karena gaji yang tidak dibayarkan saat bekerja di luar negeri. Namun tetap saja, kenyataannya menunjukkan dilihat dari berbagai bentuk media nasional hingga internasional bahwa masalah tersebut tidak bisa diputuskan mata rantainya, namun secara terus menerus muncul setiap waktunya.

Sebagai salah satu daerah di bawah administrasi provinsi pengirim Tenaga Kerja Indonesia terbanyak, yaitu Jawa Barat dalam hal ini Kabupaten Cianjur, juga terdapat beberapa kasus dimana beberapa TKI yang berasal dari daerah ini tidak

terhindar dari mengalami masalah. Bisa dikatakan bahwa masalah yang menimpa TKI dari Kabupaten Cianjur tersebut meliputi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), korban tindak pidana, keadilan hukum dan tidak dibayarkannya gaji sebagai bentuk hak mereka. Semua contoh tersebut bisa berdampak lebih jauh kepada TKI yang mengalaminya. Sejauh hingga dampaknya dirasakan terhadap keadaan pada segi ekonomi dan keadaan sosial serta psikologis dari TKI yang menjadi korban.

Beberapa kelompok masyarakat, terutama masyarakat sesama Tenaga Kerja Indonesia dan termasuk keluarganya yang berasal dari wilayah Kabupaten Cianjur dibantu dengan TKI dari pelosok tanah air lainnya menjadi “gerah” akibat peran dari negara dan pemerintah yang kurang konsisten dalam menangani setiap masalah yang ditanggung oleh para TKI dan mantan TKI ini. Masalah tersebut pun bahkan bisa mengundang atensi dari berbagai kalangan sehingga terkadang terdapat masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan TKI namun memperhatikan perkembangan masalah keadilan, sosial dan ekonomi dari TKI itu sendiri. Sampai pada titik hingga akhirnya kelompok masyarakat yang *concern* dengan hal-hal tersebut membentuk sebuah organisasi *civil society* yang berperan untuk membantu membantu para “pahlawan devisa” yang sedang terbentur oleh masalah tersebut.

Civil Society, istilah tersebut berasal dari Bahasa Latin, yaitu *civitas dei* atau kota Ilahi. Asal kata dari *civilization* (beradab). *Civil society* secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Konsepsi modern tentang *civil society* pertama kali dipakai oleh Hegel dalam *Philosophy of Right* pada tahun 1821. Definisinya

kemudian dikembangkan oleh Larry Diamond yang mengartikan bahwa “*civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from the state, and bound by legal order or set of shared rules*”.³ Secara harfiah maka organisasi *civil society* merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dan digerakkan oleh masyarakat madani atau masyarakat beradab.

Salah satu jenis dari organisasi *civil society* adalah Organisasi Non-Pemerintah (Ornop). Lembaga ini, jika dilihat karakteristik utamanya, merupakan kelompok yang memiliki misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat, baik yang berada di luar sektor negara maupun swasta.⁴ Apabila melihat dari kasus masalah yang dialami oleh para eks buruh migran atau eks TKI, maka salah satu *civil society organization*⁵ dan termasuk dalam organisasi yang memperjuangkan hak dan keadilan buruh di Indonesia yang memiliki perhatian atas isu tersebut adalah Serikat Buruh Miran Indonesia (SBMI).

Serikat Buruh Migran Indonesia⁶ sebagai salah satu organisasi serikat buruh memiliki visi diantaranya untuk memperjuangkan keadilan bagi buruh, terutama buruh migran Indonesia. Berbagai hal dan program telah dilakukan untuk dapat membantu meringankan segala masalah buruh migran dan TKI, termasuk dalam bidang sosial-

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 73.

⁴ Adi Suryadi Culla. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm. 7.

⁵ Selanjutnya penulisan disingkat menjadi CSO.

⁶ Selanjutnya penulisan disingkat menjadi SBMI.

ekonomi. SBMI DPC Cianjur pun sering terlibat dalam pemberdayaan masyarakat yang dimana menurut Silkhondze, orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok.⁷

Penelitian ini akan menjelaskan ketertarikan penulis mengenai bagaimana strategi dari SBMI DPC Kabupaten Cianjur sebagai organisasi *civil society* dalam membantu mantan pekerja migran atau TKI yang telah berada pada masa purna penempatan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada bidang ekonomi. Organisasi non pemerintah SBMI pun dalam beberapa kegiatan pemberdayaannya tidak hanya berjalan sendiri saja. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh SBMI DPC Cianjur juga tidak terlepas dari adanya kerjasama dan bantuan yaitu dengan para pendonor dan pihak lainnya dalam perencanaan hingga ke pengekseskusan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut.

Peneliti pada tahap berikutnya akan mengidentifikasi bagaimana keadaan relasi yang dialami oleh organisasi SBMI DPC Cianjur dengan berbagai pihak kekuasaan lainnya. Dapatkah pihak-pihak ini memberikan kontribusinya terhadap perkembangan dan kelangsungan untuk memberdayakan mantan TKI terutama di wilayah Kabupaten

⁷ Ravik Karsidi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah) Jurnal Penyuluhan*. Vol. 3 No. 2.

Cianjur. Jika memang pihak-pihak yang berkuasa ini dapat memberikan kontribusi dan bersinergi dengan baik maka dampak yang baik pun dapat terlihat bagi SBMI DPC Cianjur yang dimana akan berpengaruh terhadap berjalannya organisasi SBMI di kabupaten tersebut dan secara tidak langsung juga berpengaruh ke citra yang terlekat pada pemerintah, pasar/swasta dan bahkan pergerakan SBMI dalam skala nasional.

1.2 Permasalahan Penelitian

Terdapatnya beberapa masalah yang dihadapi eks TKI terutama di wilayah Cianjur yang seakan masih sulit untuk diselesaikan mungkin dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian secara mendalam baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dalam hal menangani beberapa kasus mantan TKI tersebut. Pemerintah yang terlihat masih cenderung hanya untuk menangani kasus-kasus yang terungkap di ranah publik atau media massa saja membuat beberapa masalah yang dihadapi mantan TKI lain yang tidak diketahui oleh publik atau terekspos media menjadi tidak diselesaikan dengan optimal. Akibatnya beberapa mantan TKI lain pun tidak menemui titik terang dari masalah yang mereka hadapi dan masalah yang sama memiliki kemungkinan untuk selalu muncul setiap waktunya. Terutama pada bidang ekonomi yang masih jarang diketahui masyarakat luas. Padahal tidak jarang ada mantan TKI yang justru hidup hampir atau bahkan mendekati garis kemiskinan setelah mereka pulang dari penempatan di luar negeri.

Rendahnya akan *impact* yang dirasakan dan berasal dari pemerintah ini lah yang membuat salah satu organisasi *civil society* yang memiliki perhatian terhadap kelangsungan keadilan dan kesejahteraan dari TKI dan mantan-mantan TKI yaitu SBMI DPC Cianjur melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. SBMI DPC Cianjur pun berkontribusi melalui beberapa programnya mencoba untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pendonor atau pihak-pihak lainnya untuk merencanakan hingga melaksanakan beberapa programnya. Khususnya pada bidang ekonomi, peran SBMI DPC Cianjur dapat dikatakan juga banyak berpengaruh dalam perbaikan keadaan ekonomi mantan TKI terutama di wilayah Kabupaten Cianjur. Melalui SBMI beserta dengan program-program pemberdayaannya diharapkan dapat tepat sasaran sebab SBMI merupakan kumpulan dari kelompok masyarakat eks TKI yang dapat dikatakan lebih mengetahui karakteristik dari mantan TKI itu sendiri.

Organisasi serikat buruh ini pun tidak hanya berusaha dalam hal memperbaiki ekonomi saja, namun keadaan sosial juga mereka perhatikan. Hal ini dikarenakan dampak dari masalah itu sendiri yang dialami oleh mantan TKI yang tidak hanya menysar jauh hingga ke segi ekonomi namun juga ke segi sosial. Usaha ini yang dimana membantu mantan TKI dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial di dalam organisasi diharapkan dapat mendekatkan para anggota yang membutuhkan dan kemudian dapat memperbaiki keadaan sosial dari anggota SBMI DPC Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pada paparan sebelumnya, maka penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai peran dari organisasi SBMI DPC Cianjur sebagai *CSO* dalam hal ini yaitu serikat buruh yang khusus memperhatikan buruh-buruh migran Indonesia, termasuk dalam membantu pada bidang ekonomi mantan TKI di Kabupaten Cianjur melalui program pemberdayaannya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur berperan dalam memberdayakan segi ekonomi dan sosial mantan TKI?
- 2) Bagaimana relasi antara pemerintah dan perusahaan dengan SBMI DPC Kabupaten Cianjur pada saat melaksanakan program pemberdayaan sosial ekonomi mantan TKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dan dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan dari permasalahan penelitian tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mendeskripsikan peran dari organisasi SBMI DPC Cianjur dalam memberdayakan segi ekonomi dan sosial eks TKI.
- 2) Untuk mengetahui relasi antara pemerintah dan perusahaan dengan SBMI DPC Cianjur pada saat melaksanakan program pemberdayaan sosial ekonomi mantan TKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat terlihat berdasarkan dari permasalahan dan tujuan penelitian diatas yaitu manfaat akademis, teoritis dan manfaat praktis.

- 1) **Manfaat Akademis**

Dilihat secara akademis, maka manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pada kajian sosiologis yang khususnya pada kajian studi dari *civil society* dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini pun dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembaca atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan dan untuk meneliti lebih lanjut kajian *civil society* serta pemberdayaan masyarakat, terutama melalui *Civil Society Organisation* yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diperuntukkan menambah ilmu pada kajian sosiologi, sebagai perbandingan, penerapan dan pengaplikasian dari teori-teori dan ilmu yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan. Disamping itu,

diharapkan dari penelitian ini yaitu kontribusi dalam wawasan bagi pembaca serta menjadi suatu bahan kajian dalam pembahasan peran organisasi SBMI terutama SBMI DPC Cianjur sebagai *Civil Society Organisation* dalam pemberdayaan sosial ekonomi untuk eks TKI.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai pemberi informasi mengenai peran dari *Civil Society Organisation* terutama SBMI DPC Cianjur dalam pemberdayaan bagi eks TKI. Adapun hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi berbagai kalangan seperti pemerintah yang diharapkan dapat memberikan informasi baru dalam penanganan masalah eks TKI terutama dalam bidang sosial ekonomi. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi sejenis yang juga memiliki fokus kajian pada peran *Civil Society Organisation* dan serikat buruh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bagi peneliti dan penulis sendiri, penelitian ini dapat menjadi pemenuhan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Sosial di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis ini merupakan suatu bagian yang berguna untuk menjadi tinjauan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu,

bagian ini juga menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang terdahulu. Peneliti melakukan pengkajian terhadap beberapa jurnal serta tesis yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis ambil. Tinjauan penelitian sejenis juga digunakan untuk melihat kekurangan, membandingkan dan mengembangkan penelitian terdahulu, sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya. Tinjauan penelitian sejenis yang digunakan, yaitu:

Pertama, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sisilya Saman, Regina Petronella dan Aminuyati.⁸ Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*Research and Devolepment*). Pada tahap pertama subyek penelitian sebanyak 120 orang TKI pasca migrasi di Entikong dan informan kunci (*key informant*) yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat pemerintahan. Instrumen yang digunakan berupa angket, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi sedang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menemukan model pemberdayaan TKI pasca migrasi serta edukasi bagi keluarga dan lingkungan yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Kalimantan Barat sebagai upaya untuk menumbuhkan berbagai keterampilan seperti berwirausaha sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya.

⁸ Sisilya Saman, et al. 2011. *Model Pemberdayaan TKI Pasca Migrasi Serta Edukasi Bagi Keluarga dan Lingkungan di Daerah Perbatasan Indonesia Malaysia, Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura.*

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian tersebut maka dapat dilakukan analisis yang dihasilkan pada penelitian kali ini bahwa TKI pasca migrasi pada umumnya pernah mendapat penyuluhan maupun pelatihan dari pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, tetapi dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Program yang mereka terima tidak terpola secara sistematis, sifatnya hanya temporer saja, dan tidak berkelanjutan. Selain itu, tidak terdapatnya kontrol yang terencana terhadap setiap tahapan penyelenggaraan program, akibatnya tidak ada banyak yang berubah dalam kehidupan mereka setelah selesai mengikuti program tersebut, terutama dalam hal peningkatan pendapatan atau taraf hidup.

Usaha-usaha dari para TKI pasca migrasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya, sebagian besar pada pengelolaan di bidang perkebunan seperti budidaya tanaman lada (sahang) dan coklat (kakao). Hasil dari usaha budidaya perkebunan tersebut dirasakan belum maksimal karena dengan pengelolaannya secara tradisional. Di samping itu, ada juga beberapa TKI pasca migrasi yang berusaha dalam bidang perkayuan/pertukangan. Pada akhirnya, perancangan model pemberdayaan TKI pasca migrasi ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama dengan keluarganya dengan harapan dimasa yang akan datang dapat bangkit dari keterpurukan. Model pemberdayaan yang dirancang ini adalah model pembinaan berkelanjutan yang menempatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha secara berkelanjutan menjadi sebuah kesatuan sistem pembelajaran

sehingga diharapkan TKI pasca migrasi mampu merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kiromim Baroroh.⁹ Penelitian yang dilakukan pada jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara informal serta dengan observasi atau pengamatan. Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan studi kasus LSM Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui pendidikan. Adapun penelitian di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LSM sebagai fasilitator dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM tersebut hanya difokuskan pada perempuan agar peserta pelatihan mendapatkan keterampilan (*life skill*).

Penelitian ini menjelaskan pula definisi dari LSM menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dijelaskan juga bahwa melalui aktifitas yang dilakukan, seperti adanya intervensi pembinaan akan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Melalui sistem pendekatan yang terlibat langsung dengan kelompok ini, maka pola pembinaan

⁹ Kiromim Baroroh. 2009. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill*. Jurnal Dimensia.

bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara lebih mendalam.

Penanganan terhadap masalah yang dihadapi kelompok pada akhirnya dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Selain itu, maka akan terjadilah suatu proses transformasi sosial. Hal tersebut terjadi berkat adanya interaksi yang intens antara para pembina dengan kelompok, sementara para pembina sudah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan pembina-pembina tersebut dalam membina kelompok dan menghubungkannya dengan berbagai pelayanan setempat.

Penelitian ini menjelaskan pernyataan dari Bambang Ismawan (2003) yang mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu:

- a) Program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup pendidikan dan latihan tentang ketrampilan mengelola kelembagaan kelompok, keterampilan teknik produksi, maupun ketrampilan mengelola usaha.

- b) Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
- c) Program pemupukan modal swadaya, dengan membangun sosial tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
- d) Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran dan lain-lain.
- e) Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya.

Melalui penelitian ini, peneliti menjelaskan hasil temuannya bahwa jika terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dari berlangsungnya program pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung berasal dari adanya pihak ketiga yaitu BMT Bringharjo sebagai pemberi bantuan modal serta adanya kerja sama antara pengurus LSM dan masyarakat sasaran. Namun, dalam kegiatan pemberdayaan ini juga terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi faktor penghambat yang berasal dari LSM; seperti kurangnya relawan dan relawan yang masih memiliki

ikatan dengan profesi lain; serta dari kelompok yang diberdayakan; seperti kurangnya kesadaran dan masih ragu-ragu untuk memanfaatkan kemampuan di dunia usaha.

Ketiga, penelitian sejenis yang berikutnya merupakan tesis yang ditulis oleh Abdi Rahmat.¹⁰ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan yang dipilih pada penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu meliputi tokoh-tokoh kunci dari Walhi. Penelitian pada studi ini pun menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis.

Tesis ini menjelaskan mengenai konsep dari *civil society* dan hubungannya dengan LSM. Peneliti menyajikan berbagai konsep mulai dari sejarahnya pada masa Yunani, Hegel dan Marx hingga yang pemikir yang paling mutakhir, namun ada beberapa konsep yang mungkin akan sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi setidaknya, ada dua pengertian *civil society* yaitu pertama, *civil society* sebagai institusi atau kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir secara swadaya, sukarela dan mandiri. Pada bagian kedua, dalam pengertian sebagai tatanan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang meliputi; keterkaitan dan kepatuhan terhadap norma hukum, toleransi pada pluralisme, solidaritas, kebebasan dan partisipasi serta kemandirian.

¹⁰ Abdi Rahmat. 2003. *Peran LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia (Studi Kasus Walhi)*. Tesis: Universitas Indonesia.

Penulis kemudian menjelaskan bahwa peran dari LSM diabstraksikan dan dibagi menjadi tiga peranan yang berbeda; yaitu sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*), pemberdayaan dan lembaga perantara (*intermediary institution*). Pada peranannya dalam kegiatan pemberdayaan LSM dilakukan dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas secara umum, juga dengan mengembangkan kesadaran masyarakat dengan maksud terbentuknya masyarakat yang mandiri, swadaya, dan partisipatif, serta menyadari hak-haknya sebagai warga negara. Peran ini kemudian diaktualisasikan melalui pelatihan atau pendidikan, pengorganisasian masyarakat, dan sebagainya.

Penulis menjelaskan sejarah dan perkembangan dari masa ke masa pada LSM Walhi itu sendiri, termasuk yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, maka terlihatlah peranan dari LSM Walhi dalam penguatan *civil society* di Indonesia yang dimana salah satunya adalah konstruksi peran pemberdayaan. Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Walhi yaitu dengan menyatu dalam masyarakat (*live in*) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang telah dirampas atau ditutup aksesnya untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

Hasilnya yaitu kemudian akan mengembangkan kapasitas kelembagaan dari masyarakat agar tumbuh kemandirian, keswadayaan dan partisipasi semua masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperjuangkan hak-hak mereka. Caranya dengan melalui penyadaran, pendidikan dan perngorganisasian dengan menggunakan

organisasi rakyat, masyarakat melakukan upaya perbaikan kualitas kehidupan dan advokasi hak-hak mereka. Pada sisi lain juga melakukan pendidikan terhadap masyarakat untuk mentransformasikan nilai-nilai *civility*: toleransi, solidaritas, persamaan, kepatuhan terhadap norma dan hukum, serta anti kekerasan.

Keempat, penelitian ilmiah ini ditulis oleh Arifiartiningsih.¹¹ Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara beserta dengan dokumen-dokumen. Sumber data pun diambil dari data primer yaitu Buruh Migran Perempuan (BMP) itu sendiri yang aktif dalam organisasi MUIWO. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui wawancara melalui tokoh masyarakat desa sekitar. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ilmiah ini mengambil lokasi di daerah Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo tepatnya di dalam organisasi MUIWO.

Penelitian di dalam jurnal ini bertujuan untuk menemukan program pemberdayaan apa yang tepat bagi mantan buruh migran khususnya bagi mantan buruh migran perempuan. Peneliti mengangkat isu ini dikarenakan masih adanya persoalan mantan buruh migran perempuan (BMP) yang termarginalkan atau terpinggirkan di berbagai bidang. Hal tersebut dikarenakan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi kenyataan atau realita kehidupan sosial. Minimnya pemantauan terhadap kondisi BMP yang berada di luar negeri bisa menimbulkan semakin banyaknya tekanan

¹¹ Arifiartiningsih. 2016. *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Jurnal Sosiologi Reflektif.*

yang dirasakan oleh BMP itu sendiri. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah adanya pemberdayaan yang melibatkan intervensi berbagai komunitas, baik dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal, ataupun pemerintah.

Peneliti pun menggunakan perspektif pola pemberdayaan yang diterapkan menurut J. Rothman yang dimana harus memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip tersebut yaitu; *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yakni proses pembangunan, di mana generasi-generasi mendatang memperoleh modal (*capital*) sebanyak atau bahkan lebih dengan apa yang diterima oleh generasi sekarang. Bagi para pekerja dalam pengembangan masyarakat, modal yang perlu dijaga kesinambungannya dan harus dikembangkan adalah *natural capital* (modal alam), *physical capital* (modal fisik), *human capital* (modal manusia), dan *social capital* (modal sosial).

Pada konteks yang luas, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pekerjaan kemasyarakatan secara umum berpijak pada tiga visi, yaitu menjawab tuntutan kemanusiaan, menjalankan upaya pengembangan masyarakat menuju terciptanya kondisi masyarakat yang bisa menolong diri sendiri (*self-help*), dan mengarahkan tahapan pengembangan masyarakat menuju tahapan pemberdayaan masyarakat. Intervensi Komunitas digambarkan oleh Rothman (1995) sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan, dan kebijakan sosial. Dari ketiga model intervensi tersebut, proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui

pendekatan yang bersifat konsensus seperti pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial (*social planning policy*), ataupun pendekatan aksi sosial (*social action*).

Penelitian ini menemukan beberapa hal terkait dengan pemberdayaan melalui intervensi komunitas;

- a) Pertama, pemberdayaan bagi mantan BMP di Desa Lipursari dapat dilakukan oleh individu secara subsisten dan komunitas secara kontinu. Artinya pemberdayaan mantan BMP tidak terpaku pada komunitas tertentu selama aktor yang bersangkutan memiliki keinginan untuk berubah secara mandiri;
- b) Kedua, komunitas seperti LSM dan organisasi lokal merupakan wadah yang dapat menyalurkan gagasan dan pemikiran mantan BMP. Melalui komunitas, BMP mendapat akses pemberdayaan dalam arti yang lebih luas;
- c) Ketiga, komunitas menghubungkan aktor (mantan BMP) dengan pihak pada dimensi yang lebih luas, seperti pemerintah daerah. Pemberdayaan yang berlangsung tidak dapat terlepas dari berbagai pihak yang bersinergi dengan baik. Pemerintah juga memerlukan intervensi komunitas dalam proses pemberdayaan mantan BMP baik secara ekonomi maupun sosial; dan

- d) Keempat, komunitas mengarahkan BMP untuk menyusun perencanaan bersama untuk memulai sebuah aksi.

Kelima, penelitian ilmiah ini ditulis oleh M. Rezaul Islam dan William J. Morgan.¹² Jurnal ini memfokuskan pada pembangunan sosial kapital dan pemberdayaan sosial, menggunakan dua konsep kunci dalam pembangunan, pada konteks kapasitas di *Non-governmental Organization* (NGO) di Bangladesh. Sebagaimana yang telah diperdebatkan bahwa kapasitas pembangunan adalah sebuah framework dengan mempertimbangkan elemen-elemen dan keefektifan pada pendekatan kapital sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dinyatakan oleh Putnam (1993, 2001) dan Layerack (2006). Hal tersebut telah diamati bahwa pelibatan NGO dalam negara berkembang seperti Bangladesh sekarang hanya terfokus pada formasi sosial capital dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti menyatakan bahwa dengan paradigma sosio-ekonomi dan politik yang terlihat saat ini, NGO menjadi agen penting dalam memperbaiki kondisi sosio-ekonomi.

Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa menurut The Asian Development Bank (ADB) (1999, p. 2) melaporkan bahwa kebutuhan akan NGO dimulai saat tidak efisiennya penyampaian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, dengan bantuan dari mitra-mitra pembangunannya, untuk menghilangkan

¹² M. Rezaul Islam dan William J. Morgan. 2016. *Non-governmental Organizations in Bangladesh Their Contribution to Social Capital Development and Community Empowerment. Community Development Journal.*

monopoli dan mekanisme pasar. Kekosongan yang dihasilkan oleh baik itu pemerintah dan pasar dalam memberikan pelayanan kemudian diisi oleh NGO. Intervensi pembangunan yang dilakukan oleh NGO menjadi sangat populer dan efektif dalam kegiatan pembangunan karena beberapa alasan. Namun disisi lain, program kredit mikro yang dibuat oleh NGO akhir-akhir ini telah menjadi bahan kritisi.

Hasil dari penelitian ini, beberapa ketelibatan NGO dalam kapital sosial sudah sukses. Sebagai contoh, NGO menghasilkan angka yang substansial pada fasilitas kerja dengan agensi dan melalui program income-generating (IGPs), yang dimana telah memperbaiki kepercayaan sosial antara NGO dan masyarakat lokal. NGO dan *civil society* pada dasarnya membutuhkan pertimbangan dalam usaha mobilisasi. Usaha ini bisa memajukan baik itu pemberdayaan jangka pendek yang miskin dan konsolidasi jangka panjang dalam institusi demokratis. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemimpin lokal yang “tereputasi” atau dalam Gramscian (Morgan, 1987) “intelektual organis”, yang secara informal membantu masyarakat dari dalam, mempunyai peluang yang lebih baik dalam membangun kapasitas masyarakat.

NGO dalam kasus ini mempercayai bahwa kepemimpinan bukanlah suatu proses yang harus dikembangkan dengan pelatihan, namun inisiatif tersebut telah dihambat oleh beberapa proses sosio-ekonomi dan politik, seperti *cultural lag*, sikap irasional, pengaruh politik, kurangnya bantuan dari organisasi pemerintah, dan tak adanya kerja sama dari struktur penguasa lokal. Lebih lanjut lagi, penelitian ini memperlihatkan bahwa NGO berkonsep usaha sosial membuktikan sebuah intervensi

yang efektif di dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diperhitungkan menjadi sebuah pendekatan yang menyeluruh, yang dimana dapat membuka banyak jendela untuk berkoordinasi dan berakomodasi dengan banyak jaringan sosial melalui kerja sama.

Keenam, pada penelitian ilmiah ini ditulis oleh Adhi Imam Sulaiman, Toto Sugito dan Ahmad Sabiq.¹³ Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penilitan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara termasuk *Focus Group Discussion* (FGD). Lokasi penelitian berada di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, dan Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri dengan tepat khususnya yang sering mengalami berbagai masalah selama menjalani pekerjaannya. Menurut pandangan peneliti, sudah seharusnya buruh migran mendapat perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengambilan aspirasi dalam menentukan program pemberdayaan bagi buruh migran di kedua desa tersebut tidak berjalan dengan baik. Aspirasi dan proses pembuatan keputusan umumnya diwakili oleh beberapa perangkat desa tanpa memerhatikan aspirasi masyarakat. Disamping itu, pemberian aspirasi juga masih bias gender dimana laki-laki diberikan kesempatan

¹³ Adhi Imam Sulaiman, et al. 2016. *Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

untuk beraspirasi lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Pemerintah desa juga belum bisa mengambil tindakan soal program apa yang tepat dengan memaksimalkan berbagai potensi alam desa untuk memberdayakan buruh migran tersebut bahkan lembaga-lembaga sosial pun tidak aktif memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan tentang buruh migran, baik dari segi pengetahuan hukum, peningkatan keahlian, advokasi atau perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk strategi membuat program pemberdayaan bagi mantan dan calon buruh migran. Hasilnya bahwa masyarakat dan pemerintah desa masih memiliki budaya patrimonial dengan memposisikan pemerintah desa sebagai atasan dan demokratisasi di desa pun belum terwujud. Akibat partisipasi masyarakat rendah maka program yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eksekusi program umumnya hanya di tahap penyuluhan dan pelatihan, dan tidak dilanjutkan dengan program pendampingan, *monitoring* dan evaluasi.

Peneliti menyatakan jika pemerintah perlu mengubah paradigma dari *top-down* menuju *bottom-up*. Sesuai analisis SWOT yang digunakan oleh peneliti, maka pemerintah dan masyarakat harus memiliki sifat terbuka, sejajar dan dialogis, dan masyarakat sendiri diharuskan memiliki karakter aspiratif dan aktif. Masyarakat diharuskan untuk terlibat dalam segala pembangunan di desa, serta kolaboratif dari masyarakat maupun antar lembaga masyarakat.

Ketujuh, sebuah penelitian ilmiah yang telah ditulis oleh Ahmad Ma'ruf dan Masmulyadi.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian termasuk kedalam jenis *policy research* yaitu rangkaian kegiatan penelitian, sosialisasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada selama ini, serta merumuskan kebijakan dan model pemberdayaan buruh perempuan informal. Subjek penelitian adalah buruh informal perempuan dengan mendapatkan data melalui wawancara baik itu ditempat tinggal mereka maupun saat di tempat kerja. Lokasi berada di lima kota/kabupaten di Provinsi D.I.Y yang lebih tepatnya di sentra-sentra industri informal. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data sekundernya diperoleh melalui laporan atau publikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada penelitian ini, tim peneliti telah menemukan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan untuk buruh informal perempuan memiliki SWOT sebagai berikut:

- a) *Strength*: Kekuatan yang dimiliki di antaranya adalah adanya hubungan dengan organisasi non pemerintah dan LSM, motivasi kerja buruh yang tinggi serta jumlah buruh yang cukup banyak.
- b) *Weakness*: Kelemahan yang dihadapi di antaranya adalah belum adanya jaminan sosial untuk buruh, rendahnya kesadaran untuk berserikat bagi buruh informal perempuan serta sistem upah yang tidak adil dan cenderung bias gender.

¹⁴ Ahmad Ma'ruf dan Masmulyadi. 2013. *Model Pemberdayaan Buruh Perempuan Industri Rumah Tangga*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.

- c) *Opportunities*: Peluang yang dimiliki di antaranya adalah perkembangan produk perdagangan kerajinan yang berpotensi di ekspor dan program desa wisata oleh pemerintah provinsi/kabupaten/desa setempat.
- d) *Threats*: Ancaman yang mungkin bisa terjadi di antaranya adalah adanya pemutusan hubungan kerja, perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan dan datangnya pekerja dari luar daerah.

Apabila sudah diketahui dan teridentifikasi apa saja kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan dan ancaman (SWOT) yang dimiliki, maka tahap berikutnya adalah menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk program pemberdayaan buruh informal perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Strategi S – O: Strategi kekuatan dan peluang yang dimiliki ditentukan dengan salah satunya memperkuat jaringan ornop dan LSM serta kekayaan sentra industri, untuk menangkap peluang program-program pemerintah yang prorakyat dalam bentuk kerja-kerja pendampingan, dan dukungan sumberdaya.
- b) Strategi W – O: Strategi antara kelemahan dan peluang dapat ditentukan dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar terjaminnya sosial dan kesehatan serta belum terintegrasinya pendekatan gender

mainstreaming dalam hubungan industrial agar dapat memaksimalkan dukungan kebijakan politik terhadap pemberdayaan buruh perempuan.

- c) Strategi S – T: Strategi untuk mengatasi ancaman dengan kekuatan yang dimiliki adalah salah satunya dengan menerapkan optimalisasi komunikasi antara buruh dan majikan tentang informasi bagi buruh perempuan terkait hak-hak dasarnya (jaminan sosial, kesehatan reproduksi).
- d) Strategi W – T: Strategi untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang dihadapi beberapa diantaranya dengan mengembangkan kemitraan dengan berbagai kelembagaan buruh dalam meningkatkan keberdayaan buruh perempuan dan peningkatan atau pemberdayaan kelembagaan buruh melalui pendampingan

Tabel I.1
Penelitian Sejenis

No.	Sumber	Jenis Pustaka	Metodologi Penelitian	Konsep/ Teori	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Rezaul Islam dan William J. Morgan. 2016. <i>Non-governmental Organizations in Bangladesh Their Contribution to Social Capital Development and Community Empowerment</i> . Community Development Journal. http://www.jstor.org/	Jurnal Internasional	Kualitatif; PRA, wawancara mendalam, observasi dan FGD	Pemberdayaan sosial dan pembangunan sosial kapital	Keterlibatan dan kebutuhan akan NGO/LSM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini tidak terlalu membahas akan konsep dan teori tentang <i>civil society</i> secara mendetail
2.	Kiomim Baroroh. 2009. <i>Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill</i> . Dimensia. https://journal.uny.ac.id/	Jurnal Nasional	Kualitatif; Wawancara informal dengan observasi	Konsep pemberdayaan	Mengkaji peran LSM dalam program pemberdayaan	Peneliti hanya mengidentifikasi penghambat dan pendukung program tanpa analisis SWOT.
3.	Sisilya Saman, Regina Petronella dan Aminuyati. 2011. <i>Model Pemberdayaan TKI Pasca Migrasi Serta Edukasi Bagi Keluarga dan Lingkungan di Daerah Perbatasan</i>	Jurnal Nasional	Kualitatif; <i>Research and development</i> , wawancara dan observasi.	Konsep pemberdayaan masyarakat	Mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya TKI pasca migrasi atau penempatan	Tidak menggunakan teori perspektif CSO dalam analisisnya.

	<p><i>Indonesia Malaysia, Kalimantan Barat.</i> Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura.</p> <p>http://jurnal.untan.ac.id/</p>					
4.	<p>Arifiartiningsih. 2016. <i>Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo</i>. Sosiologi Reflektif.</p> <p>http://ejournal.uin-suka.ac.id/</p>	Jurnal Nasional	Kualitatif; Wawancara dan observasi	Konsep pola pemberdayaan dan intervensi komunitas	Melihat strategi pemberdayaan yang diperuntukkan bagi buruh migran	Mengkaji dengan lebih detail yang menggunakan konsep intervensi komunitas
5.	<p>Ahmad Ma'ruf dan Masmulyadi. 2013. <i>Model Pemberdayaan Buruh Perempuan Industri Rumah Tangga</i>. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.</p> <p>http://journal.umy.ac.id/</p>	Jurnal Nasional	Kualitatif; <i>Policy research</i> , wawancara serta observasi	Konsep pemberdayaan dan analisis SWOT	Menganalisis kegiatan pemberdayaan bagi buruh dengan menggunakan SWOT	Peneliti tidak mengkaitkan peran LSM-nya dengan teori <i>civil society</i>

6.	Adhi Imam Sulaiman, Toto Sugito dan Ahmad Sabiq. 2016. <i>Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran</i> . Jurnal Ilmu Komunikasi. https://ojs.uajy.ac.id/	Jurnal Nasional	Kualitatif; Wawancara dan FGD	Konsep pemberdayaan dan analisis SWOT	Mengkaji program pemberdayaan yang dikhususkan bagi buruh migran dengan menggunakan analisis SWOT	Penelitian lebih condong menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dan cakupan dalam analisis SWOT yang lebih luas
7.	Abdi Rahmat. 2003. <i>Peran LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia (Studi Kasus Walhi)</i> . Tesis: Universitas Indonesia	Tesis	Kualitatif; Dengan deskriptif-analitis dan wawancara mendalam	Teori <i>civil society</i> dan konsep LSM	Melihat peran LSM sebagai bagian dari CSO yang dikaitkan dengan teori <i>civil society</i>	Peneliti tidak menyajikan secara rinci seperti menggunakan analisis SWOT

Sumber: Tinjauan Pustaka Peneliti, 2018

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Organisasi *Civil Society*

Alexis Charles Henri de Tocqueville berpendapat bahwa adanya unsur politik di dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil akan membuat masyarakat menjadi lebih baik dalam kegiatan partisipasi politik, seperti pemilihan atau *voting* dan juga dapat menentukan pemerintah yang dapat bertanggung jawab. Menurutnya terdapat tiga bagian dalam masyarakat, yaitu:

- Negara; parlemen, pengadilan, birokrasi dan tantara.
- Pasar; arena aktivitas ekonomi pribadi.
- Masyarakat sipil; partai, opini publik, gereja, perbaikan moral, kesastraan, masyarakat ilmiah, profesional dan asosiasi rekreasional.¹⁵

Bagian-bagian tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki relasi yang saling mempengaruhi. Adanya konsep masyarakat sipil merupakan hasil dari keseimbangan dari ketiga bagian tersebut, yaitu negara, pasar serta masyarakat sipil. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa negara, pasar dan masyarakat merupakan entitas yang berbeda namun dibutuhkan adanya saling dukungan satu sama lain dalam menciptakan demokrasi. Masyarakat sipil dalam pengertian disini merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi dan dapat menjadi kekuatan pengimbang terhadap kecenderungan intervensionis negara.¹⁶ Akmal Salim Ruhana menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara *civil society* dengan negara dan juga memiliki relasi dengan swasta. Gambaran adanya

¹⁵ Hadiwijoyo. *Op. cit.* Hlm. 90.

¹⁶ *Ibid.*

pola hubungan antara *civil society*, sektor swasta dan negara yang melakukan *take and give* yang berjalan secara seimbang dan sinergetis.

Menurut M. Olson tidak seperti keanggotaan berdasarkan negara yang inheren dalam kependudukan, asosiasi dalam *civil society* adalah kesukarelaan. Hal itu dikarakteristikan oleh individu-individu yang menggabungkan ide-ide, keinginan atau alasan yang sama untuk mempromosikan capaian kolektif. Bisa dikatakan bahwa saat individu-individu bersatu di sebuah model organisasi atau semi-organisasi, mereka melakukan suatu aksi kolektif.¹⁷ *Non-government Organization* merupakan salah satu bagian dari *civil society*.

Sering terlihat bahwa *civil society* hanya merujuk pada hal yang bersifat politik namun sebenarnya *civil society* dalam perkembangannya menyangkut pada bidang masyarakat yang lebih luas. Terlepas dari itu, perlu diingat bahwa esensi dasarnya adalah kesadaran akan pentingnya penguatan masyarakat dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan-kebijakan negara yang cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak yang lemah. Selain memiliki kapasitas sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*) dari kecenderungan-kecenderungan dominan dan intervensionis negara, *civil*

¹⁷ Michael Yaziji dan Jonathan Doh. 2009. *NGOs and Corporations*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 4.

society juga dipandang memiliki potensi untuk melahirkan kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat.¹⁸

1.6.2 Hubungan Tiga Bagian Kekusasaan Masyarakat

Ketiga komponen ini bisa saling berhubungan satu sama lain: berkompetisi atau berkonflik, berkolusi atau bersinergi dalam menggerakkan kehidupan umat manusia.¹⁹ Sinergisitas dan hubungan yang baik antara ketiga kekuasaan ini sangatlah dibutuhkan. Sinergisitas ini dibutuhkan dikarenakan akan menyangkut kehidupan bernegara sekaligus secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan kesejahteraan dari suatu negara. Baik dalam bidang ekonomi, politik hingga kehidupan bersosial. Selain itu, sinergisitas antara negara, pasar dan *civil society* ini dampaknya pun terkadang bisa sangat terasa terutama yang memiliki hubungan dengan hak asasi manusia serta lingkungan hidup.

Sinergisitas antara ketiga kekuasaan ini tentu saja diharapkan dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut pun tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja namun perlu berjalan bersama supaya terbentuklah lingkungan negara yang baik. Oleh karena itu, agar kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan

¹⁸ Nadiroh. 2007. *Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Keluarga. Hlm. 23-24.

¹⁹ Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 289.

hidup sehat berkelanjutan bisa dicapai secara optimal, maka prinsip sinegistas yang dibangun adalah setiap pilar memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian semua tujuan kemanusiaan di atas, baik sebagai individual maupun sebagai kolektivitas.

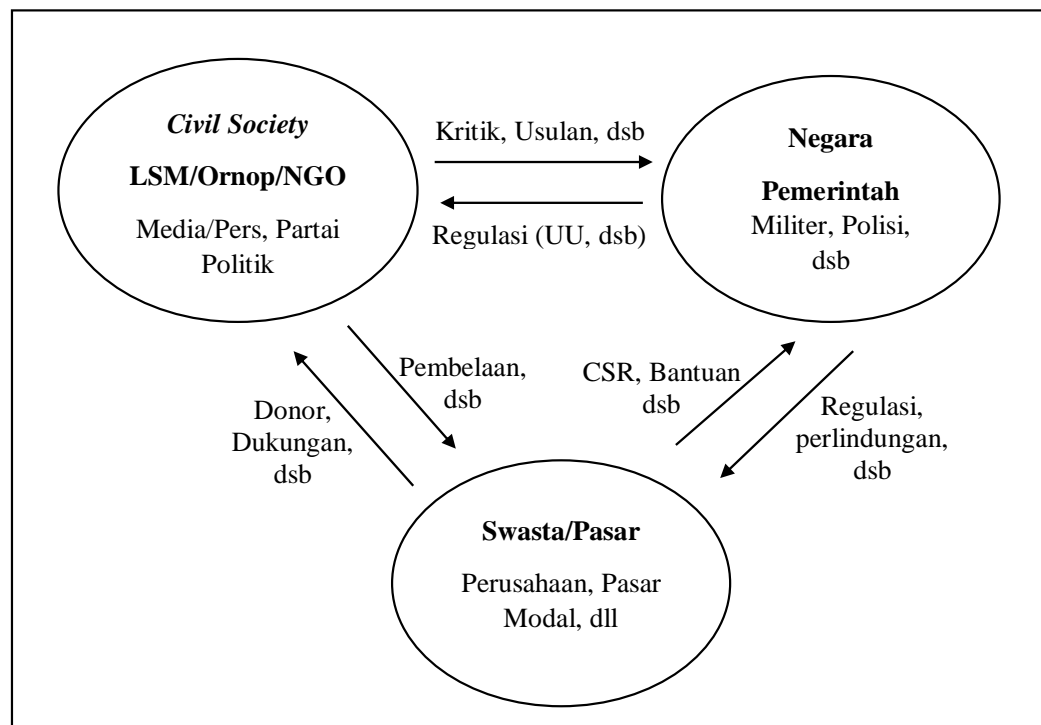
Kontribusi optimal satu pilar kekuasaan tidak menghambat pilar lain untuk menyumbangkan secara optimal apa yang seharusnya ia berikan. Oleh karena itu, setiap pilar kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan yang mutlak dan kebebasan tanpa batas. Sebab bila suatu pilar kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup pilar lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian.

Setiap pilar harus memiliki kesadaran bahwa aktor yang berada di dalamnya, di samping sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (kolektivitas), memiliki kemampuan untuk merealisasikan pencapaian optimal atau sebaliknya menemukan titik nadir dari kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan. Kesadaran tersebut akan menemukan titik ekuilibrium antara kesadaran individual dan kesadaran kolektivitas dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan

ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.²⁰

Skema I.1

Hubungan *Civil Society*-Pemerintah-Swasta



Sumber: Tinjauan Pustaka Peneliti²¹, 2018

1.6.2.1 Hubungan Antara Negara dan *Civil Society*

Civil Society diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia tidak memiliki kekuasaan mutlak dengan memperjuangkan hak-hak asasi

²⁰ *Ibid.* Hlm. 299.

²¹ Haidlor Ali Ahmad, et al. 2010. *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Hlm. 7.

mereka yang meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan serta memiliki *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara. Karena itu, Tocqueville, berdasarkan pengalamannya di Amerika, *civil society* memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara.²²

Masa Orde Lama, pada saat itu, *civil society* dikatakan belum mampu untuk meletakkan fonsasi dalam negara. Dianggap bahwa *civil society* pada kala itu memang berkembang saat masa awal, namun pada akhirnya layu sebelum berkembang dengan baik. Pada rezim Orde Baru, pun akhirnya berkembang CSO yang berdasarkan pada berbagai asosiasi profesi, seperti Ikatan Sosiologi Indonesia dan organisasi yang dikenal dengan LSM plat merah seperti Karang Taruna. Namun dikarenakan asosiasi dan organisasi tersebut bergantung terhadap bantuan finansial dan akomodasi yang diberikan dari negara, sehingga organisasi-organisasi tersebut bisa “dikendalikan” sesuai dengan keinginan pemerintah atau “mengendalikan” diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa.

²² Damsar dan Indrayani. *Op. cit.* Hlm. 295.

Berdasarkan fenomena hubungan antara negara dan *civil society* yang terjadi di Indonesia tersebut di atas, ternyata negara melalui kekuatan intervensionisnya memiliki kemampuan menciptakan hubungan kooptatif dan hegemonic terhadap *civil society*. Intervensi negara dipahami sebagai hal yang lumrah ketika negara mempunyai hak semaunya untuk mendistribusikan sumber daya finansial dan akomodasi kepada asosiasi dan organisasi yang ada. Hak semaunya dipahami sebagai suatu kemampuan untuk membuat kebijakan tanpa ada pertanggungjawaban public dan pengontrolan dari pihak lain. Hak semaunya perlahan dihapus melalui perubahan konstitusi dan aturan perundangan yang diciptakan kemudian yang berkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan sehat.

1.6.2.2 Hubungan Antara Pasar dan *Civil Society*

Hubungan antara pasar dan *civil society* bisa bersifat saling mempengaruhi. Hubungan antara *civil society* dan pasar saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain terhadap keberadaan mereka masing-masing. Namun ketika pasar dipandang terlalu serakah dan menimbulkan dampak negative terhadap kesejahteraan umat manusia, *civil society* dapat bersifat oposisi terhadap pasar.

Hubungan antara *civil society* dan pasar bisa juga dilihat dalam perspektif sosiologi ekonomi. Menurut perspektif ini *civil society* memiliki apa yang dinamakan sebagai *civic moral*. Dalam mekanisme ini, peranan *civil society* sangat aktif. Mekanisme ini sering diabaikan oleh ekonom dan teoretisi tentang negara lainnya. Struktur sosial budaya masyarakat memainkan peranan tidak kalah pentingnya dalam pembentukan keberhasilan atau kegagalan satu pembangunan. Orang dalam bertindak selalu mengorientasikan tindakannya terhadap tingkah laku orang lain, melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial. Orang menginterpretasikan (*verstehen*) adat, kebiasaan, norma dan kepentingan yang mereka miliki dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung.

The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat, tindakan ekonomi adalah suatu produk personal, etika dan pertimbangan sosial. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi melekat dalam banyak aspek sosial: budaya, kepercayaan dan seterusnya. Dalam studi Scott tentang *The Moral Economy of Peasant* menunjukkan bahwa terdapat etika tertentu yang diperhatikan oleh penguasa dan pengusaha dalam menghadapi petani yang sedang mengalami krisis subsistensi, misalnya. Sedangkan Evers dan kawan-kawan dalam *The Moral Economy of Trade* menemukan bahwa kapital sosial (*social capital*), seperti menjadi orang saleh, akan

menghindari seorang pedagang dari rumor sosial atau pengucilan sosial dari masyarakat.²³

1.6.3 Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen pembangunan lain.²⁴

Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang

²³ *Ibid.* Hlm. 297-298.

²⁴ Ambar Teguh Sulistiyani. 2017. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Hlm. 77-78

kurang/belum berdaya. Pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Bermaknaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowerment*) dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.²⁵

Awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Mungkin terjadi masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk suatu *target group* masyarakat itu sendiri. Pada sisi lain sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah merupakan bagian dari suatu masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya.²⁶

²⁵ *Ibid.* Hlm. 79.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 81.

Pelaksanaan proses dan pencapaian pemberdayaan dicapai melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan harus meliputi segala aspek, menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Mikro: pemberdayaan dilakukan melalui proses bimbingan konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas kesehariannya.
2. Pendekatan Mezzo: pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Pendekatan Makro: sering disebut strategi sistem pasar, dikarenakan sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan strategi dalam pendekatan ini.²⁷

²⁷ Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA. Hlm. 66

Tabel I.2
Pendekatan Pemberdayaan Menurut Edi Suharto

Pendekatan Mikro	Pendekatan Mezzo	Pendekatan Makro
Pemberdayaan dilakukan melalui proses bimbingan konseling, <i>crisis intervention</i> . Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas kesehariannya.	Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi.	Disebut sebagai sistem pasar, dikarenakan sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan strategi dalam pendekatan ini.

Sumber: Tinjauan Pustaka Peneliti, 2019.²⁸

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, hanya berlangsung sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari proses dan bukan hanya dilihat dari hasilnya saja. Dalam kaitannya dengan

²⁸ *Ibid.*

proses tersebut maka pemberdayaan pun memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan pemberdayaan, sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²⁹

1.6.4 Tenaga Kerja Indonesia

Konsep Tenaga Kerja sebagaimana dalam pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Sedangkan tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

²⁹ *Ibid.* Hlm. 83

2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 33 menjelaskan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja dalam negeri dan penempatan tenaga kerja luar negeri.³⁰

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 1 memiliki pengertian tersendiri terkait Tenaga Kerja Indonesia. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang juga disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Warga Negara Indonesia pencari kerja yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota dan berada di bawah tanggung jawab bidang ketenagakerjaan, maka mereka dianggap sebagai calon TKI yang sesuai dengan peraturan hukum.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104

³⁰ Eka Wahyudianta. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Calon TKI dan Eks TKI Oleh Petugas Kepolisian Bandara Soekarno Hatta*. Tesis: Universitas Indonesia. Hlm. 34-35.

A/MEN/2003 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Pengertian lain termasuk menurut Buku Pedoman Pengawasan Perusahaan Jasa, Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja. TKI bekerja baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian tersebut merupakan antara pekerja dan pengusaha secara lisan maupun tulisan untuk waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

1.6.5 Serikat Buruh

Serikat buruh merupakan suatu bagian yang seharusnya ada dan tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari kegiatan suatu pasar atau perusahaan dimanapun di dunia. Tiap-tiap negara bahkan tiap perusahaan memiliki peraturan dan kebijakan mereka masing-masing mengenai hubungan mereka atau perusahaan dengan para pekerja dan cara bagaimana mereka

memperlakukan para pekerjanya. Indonesia pun sudah memiliki peraturan dan kebijakan yang terkandung dalam Undang-Undang dengan memuat mengenai serikat buruh atau pekerja, dimana lebih tepatnya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.³¹ Kemudian pada dua ayat setelahnya ayat (2 dan 3) menyatakan bahwa terdapat dua jenis serikat pekerja/serikat buruh yaitu; serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di suatu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh diluar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh peker/buruh yang bekerja di luar perusahaan.

³¹ Tim Redaksi Fokusmedia. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan 2006*. Bandung: Fokusmedia. Hlm. 137.

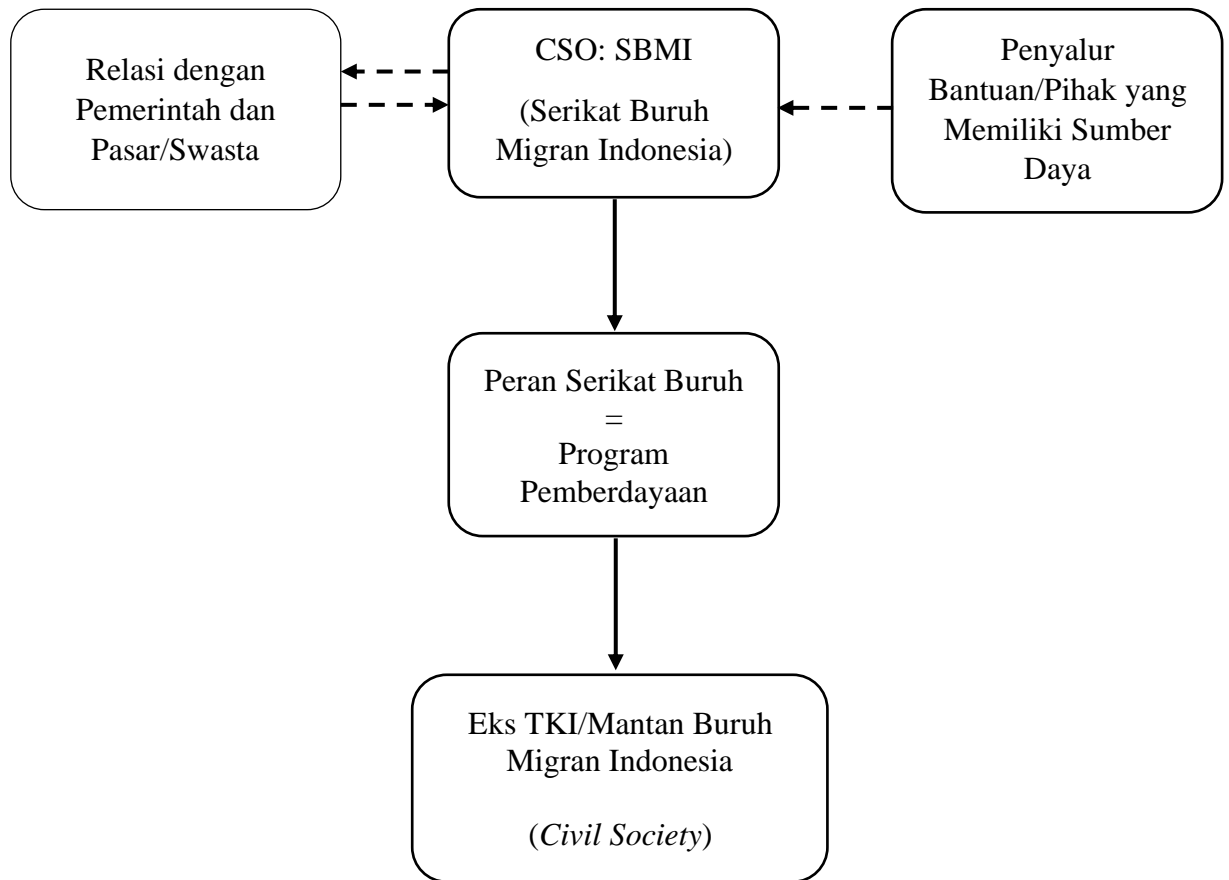
Tujuan dari didirikannya serikat pekerja/serikat buruh juga tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

1.7 Hubungan Antar Konsep

Penjelasan untuk visualisasi dari skema I.2 berikut ini peneliti akan menganalisis segala data-data yang telah ditemukan oleh peneliti yang kemudian digunakan lah melalui suatu kerangka konsep. Penjelasan dari kerangka konsep itu sendiri adalah SBMI DPC Cianjur sebagai salah satu organisasi *civil society* memiliki perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh mantan buruh migran Indonesia. Kemudian, SBMI DPC Kabupaten Cianjur pun dalam melaksanakan serangkaian program yang telah direncanakannya, termasuk program pemberdayaan, bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti pendonor dari perusahaan dan swasta. Kemudian akan dilihat bagaimana relasi organisasi dengan bagian kekuasaan masyarakat lain.

Skema I.2

Peran CSO SBMI DPC Cianjur dalam Pemberdayaan Eks TKI



Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2018

Identifikasi dalam mengetahui relasi antara organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur dengan kekuasaan, seperti pemerintah dan perusahaan akan berdampak pada program yang akan dijalankan. Relasi ini bisa memperlihatkan bagaimana intervensi atau kontribusi antar bagian kekuasaan masyarakat tersebut hingga terjadinya peningkatan kesejahteraan serta menjaga hak-hak dari mantan buruh migran Indonesia sebagai suatu masyarakat *civil society*.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi atau pendekatan kualitatif, juga dengan memakai analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema umum dan menafsirkan makna data.³²

Penelitian deskriptif menurut Sukmadinata adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.³³ Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat, maka peneliti akan melakukan kegiatan turun langsung ke lapangan. Pada kegiatan tersebut, Pada kegiatan tersebut peneliti akan bertemu langsung dengan berbagai narasumber atau

³² John W. Creswell. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 4-5.

³³ Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 72.

informan-informan yang terkait dan melakukan wawancara/*interview* untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.³⁴

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus dari CSO SBMI baik dari pusat atau yang memiliki kedudukan di Dewan Perwakilan Nasional (DPN). Kemudian subjek berikutnya adalah ketua sub divisi pemberdayaan SBMI yang sekaligus menjadi ketua Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Cianjur. Selain itu, peneliti juga menjadikan Ketua Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Cianjur beserta dengan pengurus-pengurus sub divisinya. Peneliti juga menetapkan anggota-anggotanya hingga mantan buruh migran yang telah mengikuti program pemberdayaan dari organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur sebagai subjek penelitian ini.

³⁴ M. Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Hlm. 91.

Penetapan beberapa informan yang telah disebutkan tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang akurat dan memiliki informasi yang cukup dalam mendukung penelitian ini. Informan-informan yang dipilih merupakan tiga (3) anggota dari organisasi SBMI DPC Cianjur yang menyelenggarakan program (pengurus) dan memiliki kebijakan dalam penentuan berbagai program yang akan dilakukan serta tiga (3) anggota yang menjadi penerima program pemberdayaan (peserta) yang telah dilaksanakan oleh organisasi SBMI DPC Cianjur.

Tabel I.3

Profil Informan

No.	Nama	Posisi
1.	Ajat Surajat	Ketua SBMI Daerah Perwakilan Cabang Kabupaten Cianjur
2.	Iden Ridwan	Sekretaris SBMI Daerah Perwakilan Cabang Kabupaten Cianjur
3.	Yuni Kurniati	Bendahara SBMI Daerah Perwakilan Cabang Kabupaten Cianjur
4.	Lilis	Anggota dan Ketua Kelompok Usaha Program Pemberdayaan

5.	Cucu Khodariah	Anggota Kelompok Usaha Program Pemberdayaan
6.	Soraya	Anggota Kelompok Usaha Program Pemberdayaan

1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Cianjur juga dijadikan sebagai lokasi dari kegiatan penelitian ini. Adapun lokasi dari DPC Kabupaten Cianjur ini beralamat di Jalan Sinagar, RT 003/13, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh DPC SBMI Kabupaten Cianjur yang secara rutin, tetap berjalan, berkembang serta termasuk salah satu DPC SBMI di Indonesia yang telah mencakup lebih banyak peserta dan menjadi acuan bagi DPC di kabupaten-kabupaten lainnya khususnya di Pulau Jawa. Terlebih peserta-peserta tersebut dikhususkan hanya bagi eks TKI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur saja. Penelitian ini dilakukan dimulai pada bulan April 2018 sampai Agustus 2019.

1.8.4 Peran Peneliti

Peran dari peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pengamat objek penelitian yang berusaha mengamati dan mencari informasi mengenai

peran dari organisasi SBMI dalam memberdayakan ekonomi dari mantan buruh migran Indonesia. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi mengenai temuan-temuan yang ada di lapangan. Data yang disajikan merupakan hasil dari wawancara yaitu data primer yang diperoleh dari anggota organisasi SBMI. Kemudian setelah terkumpul data-data yang diperlukan maka selanjutnya peneliti melakukan analisis, pengolahan dan pengkajian sehingga dapat mengetahui permasalahan penelitian hingga dapat dibuatkan laporan penelitiannya. Selain berasal dari data primer, peneliti juga mengumpulkan dan mengkombinasikan dengan data sekunder.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Permasalahan penelitian yang telah ditentukan perlu didukung dengan adanya pembuktian kebenaran dari data-data yang ada di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Selanjutnya, data-data itu dianalisis dan disimpulkan secara induktif.³⁵ Akhirnya dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan akan didapatkanlah pembuktian dari permasalahan penelitian yang sedang diangkat.

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 52.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- Pengamatan

Peneliti dalam penelitian ini membutuhkan adanya kegiatan turun langsung ke lapangan yang bermaksud agar peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam dan valid. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di berbagai lokasi. Lokasi tersebut diantaranya di sekretariat SBMI DPC Kabupaten Cianjur serta di lokasi tempat kelompok usaha mandiri melakukan kegiatan usahanya.

Peneliti akan menuju ke lapangan lokasi penelitian dimana organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan kesekretariatan yang bertujuan untuk mengetahui alur kegiatan program pemberdayaan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Peneliti juga mengamati kegiatan peserta program pemberdayaan dari hasil program pemberdayaan yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh dampak serta keberhasilan dari program tersebut bagi peserta.

- Wawancara

Pengumpulan data berikutnya adalah menggunakan wawancara. Teknik wawancara ini mengharuskan peneliti untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait. Peneliti menanyakan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada informan yang bertujuan agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan lebih detail. Pertanyaan pada saat wawancara akan mengacu pada pedoman wawancara yang telah direncanakan dan dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya. Adapun sebelum melakukan wawancara ini peneliti telah melakukan perjanjian serta persetujuan terlebih dahulu kepada informan agar bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

- Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan teknik studi kepustakaan dimana referensi lain dan kajian teoritis yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Peneliti menggunakan berbagai macam bentuk literatur seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Maka dari itu, dengan digunakannya teknik studi kepustakaan ini tidak akan terlepas dari hasil-hasil penelitian literatur ilmiah lain.

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam data yang berupa foto-foto, arsip serta dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan kegiatan penelitian. Data-data tersebut dikategorikan sebagai data sekunder. Kemudian, bahan-bahan data tersebut yang telah didapatkan kemudian akan diolah oleh peneliti yang kemudian akan dianalisis. Adanya dokumentasi tersebut dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan dengan jelas temuan peneliti untuk dianalisis dalam penelitian ini.

1.8.6 Triangulasi Data

Triangulasi bermaksud bahwa peneliti mengambil perspektif yang berbeda pada sebuah isu dalam studi atau—secara umum—untuk menjawab pertanyaan penelitian. Persepektif-perspektif ini bisa diperkuat dengan menggunakan beberapa metode dan/atau beberapa pendekatan teoritis. Kedua hal tersebut harus saling berhubungan. Lebih lanjut lagi, hal ini diarahkan untuk menggabungkan tipe-tipe data yang berbeda dalam perspektif teoritis, yang akan diterapkan ke dalam data.³⁶ Oleh karena itu, peneliti akan membandingkan temuan-temuan dan informasi yang telah ditemukan dari pelbagai informan di lapangan. Dilakukannya triangulasi

³⁶ Norman K. Denzin, et al. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications, Inc. Hlm. 452.

data dengan perbandingan antara satu informan valid dan dapat dipastikan keakuratan serta kebenarannya bagi penelitian ini.

Sumber triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan tiga pengurus organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur, kepala bagian pemberdayaan SBMI dan peserta-peserta dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh SBMI DPC Cianjur itu sendiri. Peserta yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan peserta yang telah menjalankan atau memiliki wirausaha informal berdasarkan dari program pemberdayaan yang telah diikutinya. Terdapatnya pandangan yang berbeda tersebut akan memperlihatkan kebenaran serta validnya informasi data yang akan ditampilkan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis dan satu bab kesimpulan. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan dari penelitian yang sejenis, kerangka konseptual, hubungan antar konsep lalu metodologi penelitian hingga sistematika penelitian.

Bab II: Pada bab kedua ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang sejarah dari organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur, kemudian visi dan misi, struktur keorganisasian SBMI. Selanjutnya akan dideskripsikan pula program-program yang telah dan sedang dijalankan oleh SBMI DPC Kabupaten Cianjur. Selain itu, peneliti juga memberikan deskripsi dari lokasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur hingga profil informan yang dijadikan sumber oleh peneliti.

Bab III: Bab ini akan membahas mengenai hasil-hasil temuan yang telah diperoleh peneliti yaitu tentang bagaimana peran dari organisasi SBMI DPC Kabupaten Cianjur dalam memberdayakan ekonomi eks TKI terutama di daerah Kabupaten Cianjur. Pada bab ini, dideskripsikan juga bagaimana SBMI dan SBMI DPC Cianjur merencanakan dan menyelenggarakan program pemberdayaan tersebut.

Bab IV: Pada bab berikut ini, peneliti akan mengkaitkan antara hasil temuan di lapangan dengan konsep dan teori yang berkaitan. Peneliti akan menggunakan konsep dan teori dari *civil society* dan pemberdayaan serta dengan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh SBMI DPC Cianjur.

Bab V: Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya.